

DETERMINAN AKSESIBILITAS *INTERNET FINANCIAL REPORTING* MELALUI *E-GOVERNMENT* DI SUMATERA BAGIAN SELATAN

Windyah Prima¹, Verawaty²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma Palembang
windiyah_prima@yahoo.co.id¹, verawaty@binadarma.ac.id²

Abstract

This study was aimed to obtain empirical evidence about the effect of variable size, income per capita, debt level, regional original income, regional wealth and type of government on the accessibility internet financial reporting in local governments in Southern Sumatra in 2016. The population used in this study was 60 local governments in Southern Sumatra. The number of samples used in this study were 60 local governments based on saturated sampling, namely having e-government until June 2018 and the e-government was not in maintenance. The analysis technique used was multiple linear regression analysis. The results of this study indicated that the size, per capita income, regional income had a positive influence, while the debt level, regional expenditure and type of government had no effect and regional wealth had a negative influence on internet financial reporting. The study implication recommends that the local government must improve the implementation of e-government in order to enhance accounting transparency that they present in the website.

Keywords: *Size, Income Per Capita, Debt Level, Regional Original Income, Regional Wealth, Type of Government, Internet Financial Reporting*

1. PENDAHULUAN

Akses terhadap informasi ini semakin dimudahkan dengan adanya perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi seperti internet, memudahkan manusia untuk saling bertukar informasi secara cepat dan mudah. Salah satu media yang dapat digunakan untuk menyebarkan informasi kegiatan pemerintah daerah adalah melalui website resmi pemerintah daerah. Pemerintah telah mengeluarkan instruksi mengenai strategi dan kebijakan tentang e-government melalui Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Telekomunikasi dan Informatika dengan mengeluarkan panduan penyelenggaraan situs web pemerintah daerah dan blue print implementasi aplikasi e-government pemerintah daerah di Indonesia.

Menurut Verawaty (2017), bila dikaitkan dengan e-government, khususnya untuk aspek akuntansi sektor publik, konsep transparansi sangat penting. Publik berhak mengetahui alokasi dana publik, bahkan mulai dari perencanaan, pengimplementasian dan progresnya, pelaporannya, dan hasil pengauditannya oleh BPK. Media e-government dapat menjadi sarana publikasi kinerja keuangan yang merefleksikan penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pengelolaan sumber daya publik.

Pengungkapan atau pelaporan akuntansi sektor publik dengan menggunakan media website pemerintah (e-government) merupakan konten yang biasa disebut Internet Financial Reporting (IFR). Menurut Verawaty (2015), IFR merupakan kombinasi kapasitas dan kapabilitas multimedia internet untuk mengkomunikasikan secara interaktif tentang informasi keuangan. Laporan keuangan yang biasanya dicetak, melalui internet pengguna laporan keuangan dapat didistribusikan lebih cepat (aspek timeliness) dan mampu mengeksplorasi kegunaan teknologi ini untuk lebih membuka diri dengan menginformasikan laporan keuangannya (aspek disclosure) dengan cangkupan jangkauan yang lebih luas dengan menggunakan media IFR kepada semua pengguna laporan keuangan yang berkepentingan.

IFR melalui e-government merupakan media yang paling memenuhi aspek 3E (Efisiensi, Efektivitas, dan Ekonomi) untuk menyediakan dan mengumumkan informasi mengenai laporan keuangan kepada semua stakeholder publik antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, DPRD, BPK, analis ekonomi, investor, kreditur, donatur, dan rakyat. Berdasarkan penelitian Verawaty

[SEMINAR NASIONAL GLOBAL COMPETITIVE ADVANTAGE]

(2015), 81,82% pemerintah daerah tingkat provinsi memiliki e-government dalam status online/aktif. Namun hanya 25,93% yang melakukan IFR. Adapun total 84,85% pemerintah kabupaten/kota memiliki e-government dalam status online/aktif. Namun hanya 39,29% yang melakukan IFR. Hal ini berarti diseminasi informasi ini erat kaitannya dengan kesiapan badan publik untuk menyediakannya agar mudah diakses oleh publik. Walaupun secara finansial serta didukung SDM yang handal, ternyata tidak semua pemerintah daerah melakukannya. Padahal menurut UU KIP Pasal 9 (4), kewajiban diseminasi informasi publik tersebut dapat disampaikan dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat, salah satunya melalui e-government yang terlebih hampir semua pemerintah daerah di Indonesia telah memilikinya. Jadi IFR dengan mudah bisa diterapkan sebagai salah satu konten di dalamnya.

Aksesibilitas dalam kamus bahasa Indonesia adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal yang dapat dikaitkan. Menurut Mustofa (2012), aksesibilitas merupakan proses pengungkapan laporan keuangan untuk dapat dikonsumsi oleh publik. Karakteristik pemerintah daerah masing-masing daerah diperkirakan memiliki pengaruh terhadap ketersediaan dan kemudahan dalam mengakses (accessibility) informasi keuangan daerah pada situs-situs resmi pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pasal 103, yang dinyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada stakeholder secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah yaitu melalui media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website, dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia adalah menguatnya aksesibilitas informasi laporan keuangan pemerintahan. Dalam konteks organisasi pemerintah, aksesibilitas internet merupakan salah satu media untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan yang dapat dikonsumsi oleh publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan aksesibilitas informasi laporan keuangan menimbulkan implikasi bagi manajemen pada institusi pemerintah untuk memberikan informasi salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan. Informasi laporan keuangan adalah suatu kebutuhan yang merupakan syarat pendukung adanya pemenuhan informasi publik kepada rakyat melalui media dimana rakyat dapat dengan mudah mengaksesnya, penyajian laporan keuangan dengan media internet merupakan pengungkapan sukarela, yang tentu saja berdampak pada adanya disparitas praktek IFR.

Beberapa pemerintah daerah mengungkapkan hanya sebagian laporan keuangannya dengan pemanfaatan teknologi internet sangat pesat, sedangkan terdapat di beberapa pemerintah daerah lain teknologi internet berkembang sangat rendah. Dengan terlihat pada saat sekarang kebanyakan pemerintahan menggunakan website melalui e-government untuk mengungkapkan informasi keuangan. Dengan keberadaan sebuah website, tentunya pemerintah berharap proses publikasi secara terbuka. Di samping itu, diharapkan dengan adanya IFR dapat membantu kelangsungan sebuah pemerintah dalam beroperasi sesuai dengan tuntutan zaman.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, hal tersebut dikaitkan dengan beberapa variabel determinan aksesibilitas internet financial reporting antara lain, size (jumlah penduduk), income per capita (pendapatan per kapita), debt level (tingkat hutang), Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah, kekayaan daerah dan tipe pemerintah. Pada penelitian ini peneliti mengacu pada Veraway (2015), peneliti menggunakan tiga variabel independen yaitu size, pendapatan per kapita (income per capita), hutang (debt level) serta dua variabel tambahan mengacu pada penelitian Mutiha (2017) yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja daerah, serta satu variabel mengacu pada penelitian Apriansyah dan Hayanto (2013) yaitu kekayaan daerah, serta satu variabel mengacu pada penelitian

Nosihana dan Yaya (2016) yaitu tipe pemerintah, sehingga total variabel yang digunakan sebanyak tujuh variabel. Peneliti juga ingin menguji variabel-variabel tersebut karena hasil penelitian tentang aksesibilitas Internet Financial Reporting masih menghasilkan temuan jika diterapkan pada kondisi lingkungan yang berbeda.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Pengaruh *size* pemerintah daerah terhadap aksesibilitas *Internet Financial Reporting* melalui *e-government*.

Menurut Goff dan Pittman (2004), jumlah penduduk yang umumnya di kota-kota besar memiliki fungsi akuntansi yang lebih besar dan anggaran yang lebih besar untuk pelayanan teknologi informasi yang mampu mendesain dan mempertahankan website yang lebih canggih. Fungsi akuntansi yang lebih luas sangat berkenaan dengan kebutuhan daerah-daerah besar untuk menyajikan lebih banyak data dalam laporan keuangan. Hal ini jelas berhubungan dengan populasi penduduk, semakin besar kota, semakin besar jumlah penduduk dan semakin besar pula anggaran yang dapat terkumpul dan tentunya semakin tinggi pula tuntutan aksesibilitas akan informasi laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Styles dan Tennyson (2007), bahwa kota-kota dengan jumlah penduduk yang lebih besar lebih mungkin untuk memberikan akses lebih mudah terhadap informasi laporan keuangan di internet. Hal ini didukung penelitian Verawaty (2012), Hilmi dan Martani (2012), Pratama dan Sanjaya (2015) yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap Internet Financial Reporting melalui e-government. Namun berbeda dengan penelitian Mutiha (2017) jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap informasi laporan keuangan, dan penelitian yang dilakukan oleh Verawaty (2015), Apriansyah dan Hayanto (2013) dan Wilopo (2017), tidak terdapat pengaruh antara jumlah penduduk terhadap Internet Financial Reporting melalui e-government. Dari beberapa penelitian terdahulu, masih terdapat ketidakkonsistenan hasil, peneliti ingin menguji kembali dan merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Size berpengaruh positif terhadap aksesibilitas Internet Financial Reporting melalui e-government.

2.2 Pengaruh *income per capita* pemerintah daerah terhadap aksesibilitas *Internet Financial Reporting* melalui *e-government*.

Menurut Giroux dan McLelland (2003) dan Ingram (2004), pemerintah daerah dengan pendapatan perkapita yang lebih besar memiliki permintaan akuntabilitas yang lebih tinggi. Permintaan yang meningkat untuk laporan keuangan akan memerlukan efisiensi biaya untuk penyediaan data laporan keuangan di website pemerintah tersebut. Efisiensi biaya ini akan lebih besar untuk daerah-daerah dengan pendapatan perkapita yang lebih tinggi yang secara umum memiliki proporsi yang lebih tinggi atas penduduk yang berhubungan dengan internet. Daerah-daerah dengan pendapatan perkapita yang tinggi kemungkinan akan memberikan aksesibilitas yang lebih mudah terhadap data laporan keuangan melalui e-government yang dimiliki. Permintaan akuntabilitas yang lebih tinggi dan penggunaan internet yang lebih luas oleh penduduk dengan pendapatan perkapita yang lebih besar mengidentifikasi suatu hubungan yang positif antara pendapatan perkapita pemerintah daerah dan penyediaan laporan keuangan di website.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Styles dan Tennyson 2007, Verawaty (2012), Wilopo (2017), dan Sinaga dan Prabowo (2011) yang membuktikan bahwa pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap Internet Financial Reporting melalui e-government. Namun berbeda dengan penelitian Verawaty (2012), Verawaty (2015), Nosihana dan Yaya (2016) dan Wilopo (2017) yang membuktikan bahwa pendapatan perkapita tidak berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting melalui e-government. Dari beberapa penelitian terdahulu, masih terdapat ketidakkonsistenan hasil, peneliti ingin menguji kembali dan merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Income per capita berpengaruh positif terhadap aksesibilitas Internet Financial Reporting melalui e-government.

2.3 Pengaruh debt level pemerintah daerah terhadap aksesibilitas Internet Financial Reporting melalui e-government.

Menurut Brecher, dkk, (2003), pemerintah dapat menggunakan hutang untuk membiayai pelayanan dan program yang relevan untuk disediakan bagi penduduk di daerah tersebut. Suatu evaluasi dari hutang daerah merupakan sebuah komponen integral dari akuntabilitas administrasi pemerintahan daerah. Membiayai pengeluaran daerah dengan hutang mempengaruhi kemampuan daerah tersebut untuk menyediakan program dan pelayanan di masa yang akan datang. Tingkat hutang yang lebih tinggi dapat membebaskan beban bunga dan principal repayment di masa yang akan datang yang dapat mengurangi kemampuannya untuk memenuhi permintaan penduduk di masa yang datang untuk pelayanan atau beban pajak yang lebih tinggi untuk generasi pembayar pajak di masa yang akan datang. Penggunaan hutang untuk membiayai aktivitas publik merupakan pendorong bagi manajer sektor publik untuk mengurangi biaya hutang.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Laswad dkk, (2005), Styles dan Tennyson (2007), Rahman dan Budiarmanto (2013) dan Sinaga dan Prabowo (2011), yang menunjukkan bahwa debt level berpengaruh positif terhadap Internet Financial Reporting melalui e-government. Namun berbeda dengan penelitian Verawaty (2012), Verawaty (2015), Nosihana dan Yaya (2016) dan Wilopo (2017), yang menunjukkan bahwa debt level tidak berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting melalui e-government. Dari beberapa penelitian terdahulu, masih terdapat ketidakkonsistenan hasil, peneliti ingin menguji kembali dan merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Debt level berpengaruh positif terhadap aksesibilitas Internet Financial Reporting melalui e-government.

2.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap aksesibilitas Internet Financial Reporting melalui e-government.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah yang memiliki PAD yang tinggi akan menunjukkan kepada para stakeholder bahwa pemerintah daerah telah memiliki kinerja yang tinggi. Pemerintah daerah yang memiliki kinerja yang buruk akan membatasi akses informasi untuk masyarakat. sebaliknya, pemerintah daerah yang memiliki kinerja yang baik akan melakukan pengungkapan informasi yang lebih banyak dengan menggunakan teknik penyampaian informasi yang lebih baik sesuai dengan teori signalling.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Sujana (2015), yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap informasi Internet Financial Reporting melalui e-government. Namun berbeda dengan penelitian Mutiha (2017) karena Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Internet Financial Reporting melalui e-government, dan penelitian yang dilakukan oleh Nosihana dan Yaya (2016) dan Wilopo (2017), tidak terdapat pengaruh terhadap Internet Financial Reporting melalui e-government. Dari beberapa penelitian terdahulu, masih adanya temuan hasil yang tidak konsisten, sehingga perlu melakukan pengujian kembali untuk mengetahui konsistensi temuan penelitian dengan merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Rasio Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap aksesibilitas Internet Financial Reporting melalui e-government.

2.5. Pengaruh belanja daerah terhadap aksesibilitas *Internet Financial Reporting* melalui *e-government*.

Menurut UU No. 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah pasal 167 ayat 1, belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Apabila pemerintah daerah mampu melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat maka artinya pemerintah daerah memiliki kinerja yang tinggi. Hal ini terwujud dalam pelayanan kepada masyarakat berupa peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak dan mengembangkan sistem jaminan sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan semakin tinggi keinginan pemerintah daerah untuk mengungkapkan informasi pelayanan tersebut melalui website pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Pratama dan Sunjaya (2015) yang menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting* melalui *e-government*. Namun berbeda dengan penelitian Mutiha (2017) karena belanja daerah berpengaruh negatif terhadap *Internet Financial Reporting* melalui *e-government*, dan penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2017), tidak terdapat pengaruh antara belanja daerah dengan *Internet Financial Reporting* melalui *e-government*. Dari beberapa penelitian terdahulu, masih adanya temuan hasil yang tidak konsisten, sehingga perlu melakukan pengujian kembali untuk mengetahui konsistensi temuan penelitian dengan merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Belanja daerah berpengaruh positif terhadap aksesibilitas Internet Financial Reporting melalui e-government.

2.6 Pengaruh kekayaan daerah terhadap aksesibilitas *Internet Financial Reporting* melalui *e-government*.

Menurut Styles dan Tennyson (2007), besarnya kekayaan daerah juga berbanding lurus dengan kepedulian masyarakat tentang kinerja pemerintah daerah. Kota dengan tingkat kekayaan yang lebih tinggi akan memiliki tingkat pemantauan politik dan informasi yang lebih tinggi atas gambaran tentang kinerja pemerintah daerah. Semakin besar aset yang dimiliki suatu daerah menandakan semakin besar juga ukuran pemerintah daerah tersebut. Aset dapat mewakili seberapa besar pemerintahan, semakin besar aset maka semakin banyak modal yang ditanam. Maka dari itu, ukuran pemerintah daerah yang besar mengindikasikan terdapat jumlah kekayaan yang besar pula, pengawasan dari masyarakat akan kegiatan pemerintah akan semakin ketat pula karena terdapat kekhawatiran adanya penyelewengan dana yang mungkin saja terjadi. Pemerintah pasti akan berusaha sebisa mungkin mengurangi asimetri informasi keuangan terhadap masyarakat yang mulai beranggapan negatif dengan mempublikasikan laporan keuangannya, karena telah adanya *e-government* tersebut maka akan dipilih karena penggunaannya yang mudah dan cepat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Laswad dkk, (2005), Hilmi dan Martani (2012), Sinaga dan Prabowo (2011), Sutaryo dan Budiartanto (2013), Nosihana dan Yaya (2016), Pratama dan Sujana (2015) yang menunjukkan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting* melalui *e-government*. Namun berbeda dengan penelitian Apriansyah dan Hayanto (2013) dan Wilopo (2017), tidak terdapat pengaruh antara kekayaan daerah terhadap *Internet Financial Reporting* melalui *e-government*. Dari beberapa penelitian terdahulu, masih adanya temuan hasil yang tidak konsisten, sehingga perlu melakukan pengujian kembali untuk mengetahui konsistensi temuan penelitian dengan merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₆: Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap aksesibilitas Internet Financial Reporting melalui e-government.

2.7 Pengaruh tipe pemerintah terhadap aksesibilitas *Internet Financial Reporting* melalui *e-government*.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Laswad, dkk (2005). Tipe pemerintah daerah dapat diartikan sebagai bentuk pemerintah daerah. Terdapat dua tipe pemerintahan daerah di Indonesia, yaitu pemerintah kota dan pemerintahan kabupaten. Dari beberapa pemerintahan kota dan pemerintahan kabupaten tersebut membentuk suatu provinsi. Suatu daerah dengan populasi yang besar akan memiliki permasalahan pemerintahan yang semakin kompleks sehingga pemerintahannya memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang lebih transparan. Didefinisikan bahwa pada pemerintah di kota yang ukuran (luas wilayah) relatif lebih kecil dan kepadatannya lebih besar akan memiliki jaringan yang lebih bagus dibandingkan dengan daerah kabupaten, sehingga semakin baik jaringan pemerintah yang dimiliki akan dianggap lebih memberikan pengungkapan laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sinaga dan Prabowo (2011) yang menunjukkan bahwa tipe pemerintah berpengaruh negatif terhadap *Internet Financial Reporting* melalui *e-government*, dan penelitian yang dilakukan oleh Sutaryo dan Budiartanto (2013), Laswad dkk, (2005) serta Nosihana dan Yaya (2016), tidak terdapat pengaruh antara tipe pemerintah terhadap *Internet Financial Reporting* melalui *e-government*. Dari beberapa penelitian terdahulu, masih adanya temuan hasil yang tidak konsisten, sehingga perlu melakukan pengujian kembali untuk mengetahui konsistensi temuan penelitian dengan merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₇: Tipe pemerintah berpengaruh positif terhadap aksesibilitas Internet Financial Reporting melalui e-government.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pemerintah daerah di Sumatera Bagian Selatan. Pada tahun 2016 terdapat 60 pemerintah daerah di Sumatera Bagian Selatan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi aksesibilitas *Internet Financial Reporting* melalui *e-government* pada pemerintah daerah di Sumatera Bagian Selatan dengan menggunakan satu variabel terikat (dependent) dan tujuh variabel bebas (independent). Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu aksesibilitas *Internet Financial Reporting* (Calculation of Accessibility Index) dan variabel bebas yang terdiri dari size (jumlah penduduk), income percapita (PDRB perkapita atas dasar harga berlaku), debt level (rasio hutang dan jumlah penduduk), Pendapatan Asli Daerah (rasio total PAD dan total pendapatan), belanja daerah (rasio total belanja langsung dengan total belanja), kekayaan daerah (total aset) dan tipe pemerintah (1 untuk pemerintah kota dan 0 untuk pemerintah kabupaten).

Metode pemilihan sampel pada penelitian ini ditentukan dengan metode sampling jenuh. Dari populasi sebanyak 60 pemerintah daerah di Sumatera Bagian Selatan digunakan menjadi sampel, maka pemerintah daerah yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu ada 60 pemerintah daerah di Sumatera Bagian Selatan. Adapun kriteria penentuan dalam sampel ini adalah sebagai berikut; 1. Merupakan pemerintah daerah di Sumatera Bagian Selatan; 2. Merupakan pemerintah daerah yang memiliki *e-government* dan tidak dalam perbaikan; serta 3. Memiliki kelengkapan data dan informasi keuangan mengenai-mengenai variabel-variabel yang diteliti. Metode analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda (multivariate regression).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi layak digunakan dalam penelitian (Ghozali, 2016). Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen atau terikat. Berikut ini tabel hasil uji signifikansi simultan:

Tabel 1
Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	63.768	7	9.110	3.235	.006 ^b
Residual	146.415	52	2.816		
Total	210.183	59			

a. Dependent Variable: IFR

b. Predictors: (Constant), tipe, size, income, belanja, debt, PAD, kekayaan

Berdasarkan hasil uji ANOVA atau F di atas, didapat F hitung sebesar 3.235 dengan tingkat probabilitas 0,000 (signifikan). Tabel 2 yaitu hasil uji F (regresi simultan) menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 maka hipotesis alternatif diterima. Hal ini berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Internet Financial Reporting atau dapat dikaitkan variabel size, income per capita, debt level, pendapatan asli daerah, belanja daerah, kekayaan daerah, tipe pemerintah berpengaruh terhadap variabel dependennya yaitu Internet Financial Reporting (IFRACCESS).

4.2 Uji Signifikansi Simultan Parsial (Uji t)

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas (independen) secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Untuk mengetahui pengaruh tersebut maka digunakan tingkat signifikansi 1%, 5%, 10%. Dari pengujian hipotesis secara parsial diperoleh hasil yaitu sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Signifikansi Simultan Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	47.775	19.532		2.446	.018
Size	.956	.544	.301	1.757	.085
Income	1.771	.506	.459	3.498	.001
Debt	-.200	.293	-.095	-.681	.499
PAD	.012	.004	.361	2.658	.010
Belanja	.000	.003	-.006	-.045	.964
Kekayaan	-2.215	.797	-.503	-2.778	.008
Tipe	-.432	.682	-.086	-.633	.529

a. Dependent Variable: IFR

Berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel 2, terlihat variabel income per capita, pendapatan asli daerah dan kekayaan daerah menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap variabel independen, yaitu Internet Financial Reporting dengan tingkat signifikansi 1%. Adapun variabel size menunjukkan hubungan yang signifikansi terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikansi 10%. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikan untuk income per capita, pendapatan asli daerah dan kekayaan daerah sebesar 0,001, 0,010, 0,008 (sig.<1%), sedangkan nilai probabilitas signifikan untuk size sebesar 0,085 (sig. <10%).

4.4 Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis pertama diperoleh hasil nilai tingkat signifikansi yang menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima. Hasil pengujian menunjukkan bahwa size berpengaruh positif

[SEMINAR NASIONAL GLOBAL COMPETITIVE ADVANTAGE]

signifikan terhadap Internet Financial Reporting dengan nilai signifikansi sebesar 0,085 lebih kecil dari 0,1 ($\alpha = 10\%$) dan nilai koefisien regresi sebesar 0,956. Maka dari itu, berdasarkan hasil hipotesis tersebut menyatakan bahwa size berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting melalui e-government pada pemerintah daerah. Hasil analisis ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Apriansyah dan Hayanto (2013), Verawaty (2015) dan Wilopo (2017), yang menyatakan bahwa size tidak berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting. Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Verawaty (2012), Hilmi dan Martani (2012), Pratama dan Sujana (2015) yang menyatakan bahwa size berpengaruh positif terhadap Internet Financial Reporting melalui e-government. Hal ini berarti menunjukkan kondisi bahwa pemerintah daerah menghadapi kenaikan permintaan dan tuntutan terhadap pengawasan informasi dan dorongan yang lebih terhadap kinerja pemerintah dalam kota-kota besar yang menyediakan program dan pelayanan untuk jumlah penduduk yang besar. Hal tersebut dikarenakan semakin besar jumlah penduduk yang diperoleh suatu pemerintah daerah semakin tinggi dalam aksesibilitas informasi laporan keuangan yang akan dipublikasikan untuk publik melalui e-government.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima, hasil pengujian menunjukkan bahwa income percapita pemerintah daerah dengan proksi PDRB perkapita atas dasar harga berlaku berpengaruh positif signifikan terhadap Internet Financial Reporting dengan nilai signifikansi 0,001 yang dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,01 ($\alpha = 1\%$) dan nilai koefisien regresi sebesar 1,771. Maka dari itu, berdasarkan hasil hipotesis tersebut menyatakan bahwa income percapita berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting melalui e-government pada pemerintah daerah. Hasil analisis ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Mutiha (2017) yang menyatakan bahwa income percapita berpengaruh negatif terhadap Internet Financial Reporting melalui e-government. Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Verawaty (2012), Sinaga dan Prabowo (2011) dan Wilopo (2017) yang menyatakan bahwa income percapita berpengaruh positif terhadap Internet Financial Reporting melalui e-government. Hal ini berarti menunjukkan bahwa besar kecilnya income per capita yang dimiliki pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan perkapita yang lebih tinggi akan memiliki tingkat pengawasan politis yang lebih tinggi oleh kelompok masyarakat dan lebih banyak permintaan akan informasi atas laporan keuangan yang akan diterima oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan tingkat kesejahteraan masyarakat dilihat dari masyarakat yang produktif dengan pendapatan perkapita pada masyarakat lebih tinggi. Jika kesejahteraan di suatu daerah baik cenderung pola pikir masyarakat yang maju, situasi ini akan mendorong pemerintah daerah dalam aksesibilitas untuk melakukan mempublikasikan informasi keuangan pemerintah daerah melalui e-government.

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa hipotesis ketiga ditolak, hasil pengujian menunjukkan bahwa debt level pemerintah daerah dengan proksi tingkat hutang berpengaruh negatif terhadap Internet Financial Reporting dengan nilai signifikansi 0,499 yang dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,1 ($\alpha = 10\%$) dan nilai koefisien regresi sebesar -0,200. Maka dari itu, berdasarkan hasil hipotesis tersebut menyatakan bahwa debt level tidak berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting melalui e-government pada pemerintah daerah. Hasil analisis ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Sinaga dan Prabowo (2011) dan Sutaryo dan Budiarmanto (2013) yang menyatakan bahwa debt level berpengaruh positif terhadap Internet Financial Reporting. Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Verawaty (2012), Verawaty (2015), Nosihana dan Yaya (2016), dan Wilopo (2017) yang menyatakan bahwa debt level tidak berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting melalui e-government. Berdasarkan hasil pengamatan dalam penelitian ini bahwa pemerintah daerah yang memiliki hutang paling tinggi, yaitu pemerintah kota Bandar Lampung dengan nilai sebesar 6.65. ternyata hanya memiliki tingkat aksesibilitas senilai 2 atau di bawah nilai rata-rata Internet Financial Reporting 3. Berdasarkan teori sinyal, tingkat hutang yang tinggi merupakan salah satu sinyal bad news

[SEMINAR NASIONAL GLOBAL COMPETITIVE ADVANTAGE]

yang menunjukkan kinerja buruk pemerintah daerah tersebut. Maka pemerintah daerah akan cenderung menghindari media pelaporan seperti penggunaan website untuk menghindari image buruk. Tingkat hutang yang tinggi merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian stakeholder, sebab tingkat hutang yang dianggap dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap prospek pemerintah daerah ke depannya. Hal ini berarti makin tinggi tingkat hutang tidak menjamin makin tingginya tingkat pengungkapan termasuk aksesibilitasnya. Dengan demikian, debt level pemerintah daerah tersebut tidak dapat mempengaruhi Internet Financial Reporting melalui e-government.

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa hipotesis keempat diterima, hasil pengujian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Internet Financial Reporting dengan nilai signifikansi 0,010 yang dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,01 ($\alpha = 1\%$) dan nilai koefisien regresi sebesar 0,012. Maka dari itu, berdasarkan hasil hipotesis tersebut menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting melalui e-government pada pemerintah daerah. Hasil analisis ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Nosihana dan Yaya (2016) dan Wilopo (2017) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting. Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Pratama dan Sunjaya (2015) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap Internet Financial Reporting melalui e-government. Hal ini berarti kekayaan pemerintah menunjukkan bukti nyata atas kinerja pemerintah daerah yang baik dalam mengelola keuangan pemerintah daerah, sehingga semakin besar pendapatan asli daerah pemerintah daerah maka kecenderungan pemerintah daerah untuk melaporkan keuangannya juga semakin tinggi dan juga aksesibilitasnya, tujuannya adalah agar masyarakat dapat terus mendukung kinerja pemerintah saat ini, sehingga kegiatan pemerintah dapat berjalan dengan baik dan masyarakat juga tahu bagaimana kekayaan daerah tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa hipotesis kelima ditolak, hasil pengujian menunjukkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting dengan nilai signifikansi 0,964 yang dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,1 ($\alpha = 10\%$) dan nilai koefisien regresi sebesar 0,000. Maka dari itu, berdasarkan hasil hipotesis tersebut menyatakan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting melalui e-government pada pemerintah daerah. Hasil analisis ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Pratama dan Sujana (2015) yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap Internet Financial Reporting. Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Wilopo (2017) yang menyatakan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting melalui e-government. Belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan, fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 31 tahun 2016 untuk alokasi APBD bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk pendidikan dan kesehatan. Alokasi belanja daerah saat ini belum difokuskan untuk peningkatan sistem informasi keuangan daerah, khususnya pemukhtahiran website pemerintah (e-government) termasuk tingkat aksesibilitasnya. Dengan demikian, belanja daerah tidak dapat mempengaruhi Internet Financial Reporting melalui e-government.

Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa hipotesis keenam diterima, hasil pengujian menunjukkan bahwa kekayaan daerah berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting dengan nilai signifikansi 0,008 yang dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$) dan nilai koefisien regresi sebesar -2,215. Maka dari itu, berdasarkan hasil hipotesis tersebut menyatakan bahwa kekayaan daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Internet Financial Reporting melalui e-government pada pemerintah daerah. Hasil analisis ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Sinaga

dan Prabowo (2011), Pratama dan Sunjaya (2015) yang menyatakan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap Internet Financial Reporting. Akan tetapi, hasil analisis ini juga tidak konsisten dengan hasil penelitian Apriansyah dan Hayanto (2013) dan Wilopo (2017) yang menyatakan bahwa kekayaan daerah berpengaruh negatif terhadap Internet Financial Reporting melalui e-government. Berdasarkan hasil pengamatan dalam penelitian ini bahwa pemerintah daerah yang memiliki hutang paling tinggi, yaitu pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan nilai sebesar 29.65, ternyata hanya memiliki tingkat aksesibilitas senilai 1 atau di bawah nilai rata-rata Internet Financial Reporting 3. Pada dasarnya kepala pemerintah daerah besar mempunyai dorongan untuk mengurangi penundaan laporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan kepala pemerintah daerah yang berskala besar cenderung diberikan insentif untuk mengurangi informasi laporan keuangan. Banyaknya aset yang dimiliki oleh pemerintah sebagian besar merupakan aset tetap. Untuk membangun infrastruktur sistem informasi berbasis website diperlukan dana aset lancar. Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap semua neraca pemerintah daerah yang menjadi objek penelitian ini, porsi untuk aset lancar hanya 21,2% dan lebih di prioritaskan untuk kegiatan operasional pemerintah. Dengan demikian, kekayaan daerah tidak dapat mempengaruhi Internet Financial Reporting melalui e-government.

Hasil pengujian hipotesis ketujuh menunjukkan bahwa hipotesis ketujuh ditolak, hasil pengujian menunjukkan bahwa tipe pemerintah tidak berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting dengan nilai signifikansi 0,529 yang dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,1 ($\alpha = 10\%$). Maka dari itu, berdasarkan hasil hipotesis tersebut yang menyatakan bahwa tipe pemerintah tidak berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting melalui e-government pada pemerintah daerah. Hasil analisis ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Sinaga dan Prabowo (2011) yang menyatakan bahwa tipe pemerintah berpengaruh negatif terhadap Internet Financial Reporting. Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Sutaryo dan Budiarmanto (2013), Laswad, dkk (2005) yang menyatakan bahwa tipe pemerintah tidak berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting melalui e-government. Berdasarkan hasil pengamatan dalam penelitian ini bahwa pemerintah daerah yang memiliki tingkat aksesibilitas Internet Financial Reporting paling tinggi, yaitu pemerintah Kabupaten Tebo dengan nilai sebesar 8 dari nilai tertinggi 10. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia sudah mulai merata, segala penjuru daerah hingga pedesaan. Hal ini berarti kemajuan teknologi dan informasi antara di pemerintah kota dan pemerintah kabupaten sama saja. Contohnya pemerintah Kabupaten Tebo menjadikan e-government sebagai media informasi yang efektif dalam mempublikasikan keuangannya. Berbagai undang-undang dan instruksi pemerintah dalam mengatur apa saja yang harus diungkapkan pemerintah kota dan kabupaten juga sama, sehingga tidak ada perbedaan dalam melakukan transparansi keuangan pada e-government, termasuk aksesibilitasnya. Dengan demikian, tipe pemerintah tidak dapat mempengaruhi Internet Financial Reporting melalui e-government.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa size, income percapita, pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Internet Financial Reporting, sedangkan debt level, belanja daerah, dan tipe pemerintah tidak berpengaruh serta kekayaan daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Internet Financial Reporting melalui e-government pada pemerintah daerah di Sumatera Bagian Selatan. Pemerintah daerah berkewajiban dalam memberikan informasi publik dengan ketepatan waktu secara lebih transparansi serta ketersediaan dalam mempublikasikan informasi laporan keuangan sangat mempengaruhi oleh lamanya waktu penyelesaian audit. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan untuk dapat lebih teliti dalam melakukan prosedur audit sehingga informasi laporan keuangan dapat diakses dengan cepat, efisien, mudah, dan dijangkau masyarakat dan mudah dipahami. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya memperluas objek penelitian seperti pemerintah daerah seluruh

[SEMINAR NASIONAL GLOBAL COMPETITIVE ADVANTAGE]

pemerintah daerah di Indonesia, sehingga tidak hanya terbatas pada pemerintah daerah yang berada di Pulau Sumatera khususnya yang berada di Sumatera Bagian Selatan saja. Sebaiknya juga penelitian selanjutnya menambahkan variabel-variabel yang lainnya yang layak digunakan untuk menjelaskan berkaitan dengan aksesibilitas Internet Financial Reporting melalui e-government sebagai sarana transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik.

6. REFERENSI

- [1] Afryansyah, Rahmad Dian & Haryanto. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet oleh Pemerintah Daerah. *Journal of Accounting*, Vol. 2 No. 3 Hal. 1-11.
- [2] Groff, J.F., & Pitman, M.K., 2004. Municipal Financial Reporting on the World Wide Web: A Survey of Financial Data Displayed on the Official Websites of the 100 largest US Municipalities. *Journal of Government Financial Management*, Vol. 53 No. 2 Hal. 20-30.
- [3] Giroux, G., & McLelland, A.J., 2003. Governance Structure and Accounting at Large Municipalities. *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol. 22 No. 3 Hal. 203-230.
- [4] Hilmi, Amirudin Z., & Martani, Dwi. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. Paper dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin, 20-23 September 2012.
- [5] Ingram, R.W., & Dejong, D.V., 1987. The Effect of Regulation on Local Government Disclosure Practises. *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol. 6 No. 4 Hal. 245-270.
- [6] Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P., 2005. Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol. 24 No. 2 Hal. 101-121.
- [7] Mustofa, Anies Iqbal. 2012. Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 1 No. 1 Hal. 1-6.
- [8] Mutiha, Arthaingan H. 2017. Faktor Penentu Aksesibilitas Internet Financial Reporting pada E-Government Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Barat. Paper dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi, Universitas Widyatama, Bandung, 20 Juli 2017.
- [9] Nosihana, Ariefia & Yaya, Rizal. 2016. Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 3 No. 2 Hal. 87-101.
- [10] Pratama, Kadek Aris Dwi & Sujana, Edy. 2015. Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah dan Belanja Daerah terhadap Pelaporan Keuangan Daerah. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 3 No.1 Hal. 1-12.
- [11] Rahman, A., Sutaryo, & Budiartanto, Agus. 2013. Determinan Internet Financial Local Government Reporting di Indonesia. Paper dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado, 25-28 September 2013.
- [12] Sinaga, Yurisca Febriyanti & Prabowo, Tri Jatmiko Wahyu. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan di Internet secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah. http://eprints.undip.ac.id/28576/1/JURNAL_YURISCA_C2C007142.pdf
- [13] Styles, A.K. & Tennyson, M., 2007. The Accessibility of Financial Reporting of US Municipalities on the Internet. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, Vol. 19 No. 1 Hal. 56-92.
- [14] Verawaty, V. 2012. The Accessibility of Public Information of Local Government through E-government in Indonesia. Paper dipresentasikan pada International Public Sector Conference (IPSC), Kinabalu, Malaysia, 25-26 September 2012.
- [15] Verawaty, V., 2015. Determinan Aksesibilitas Internet Financial Reporting melalui E-Government Pemerintah Daerah di Indonesia. Paper dipresentasikan pada Seminar Nasional Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVIII, Universitas Sumatera Utara, Medan, 16-19 September 2015.



[SEMINAR NASIONAL GLOBAL COMPETITIVE ADVANTAGE]

- [16] Verawaty, V., 2017. Accountability and Internet Financial Reporting of Local Government: An Indonesia Analysis. LAMBERT Academic Publishing, Germany.
- [17] Wilopo, Indra Agung. 2017. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas dan Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui Website. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. VII No. 1 Hal. 61-78.

